

FLYPAPER EFFECT: FENOMENA SERIAL WAKTU DAN LINTAS KABUPATEN KOTA DI JAWA TIMUR 2003-2013

Deni Oktavia

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Abstract

The aims of local autonomy is to achieve local independence funding, so the interference of the central government decrease. Local governments have funding source from the own region revenues (PAD), which is used to finance expenditures and development. Regency or municipalities funding sources not only their PAD. Local governments also get help from central government transfers such block grant aid or transfer fund (DAU). In the course of the central government transfers actually become a disincentive for increased regional funding. Regions become more dependent on central government transfers rather than optimize their own revenues (PAD). There are has indications of asymmetric behavior in response to the transfer of central government.

Region revenues (PAD) and the transfer fund (DAU) from central government is generally positive effect on the regional expenditure (BD). Results for the time series test indicates that occurred flypaper effect, indicated by DAU more significant influence on regional expenditure of the influence of the PAD. Regency or municipalities in East Java generally done flypaper effect, BD response was greater from DAU components.

Key words: *region revenues, transfer fund, regional expenditure*

1. PENDAHULUAN

UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Otonomi Daerah dipandang memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publick service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah tersebut dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. Serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 155 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pembentukan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follow function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Saat ini transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang dalam hal ini disamakan istilahnya dengan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga dalam prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” diperhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal

antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjutak dalam Maimunah, 2006).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pendapatan asli daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999 dalam Halim 2003). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia (Kuncoro, 2007).

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Halim, 2002).

Flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Unconditional grants yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat.

Setiap transfer tidak bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah walaupun dalam beberapa studi empiris banyak ditemukan bahwa transfer tak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya.

Penelitian *flypaper effect* sebelumnya telah banyak yang mengangkat permasalahan transfer ini, di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah (Fisher, 1982 dalam Halim, 2003). Khususnya di daerah Winconsin di AS sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer Pempus (Deller et al., 2002). Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko.

Menurut data dari kemendagri, komposisi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2012 secara nasional dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2012, dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan

daerah yaitu sebesar sebesar 69,0% atau Rp.380,601 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar 20,4% atau sebesar Rp.112,720 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 10,6% atau sebesar Rp.58,262 triliun

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian tentang *flypaper effect* di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan dan hasil yang berbeda-beda contohnya Maimunah (2006) pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya *flypaper effect* DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera dan juga. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota dianggap memiliki kemampuan keuangan berbeda-beda.

Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Maimunah (2006) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap BD dan telah terjadi *flypaper effect* pada BD pada Kabupaten/kota di Sumatera. Widodo (2007) menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* hanya pada perhitungan belanja daerah ditahun 2003, sedangkan tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak ditemukan adanya *flypaper effect*. Pramuka (2010) ternyata menyimpulkan tidak terjadinya *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Kusumadewi dan Rahman (2007) mengindikasikan bahwa *Flypaper Effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya *flypaper effect* di kabupaten kota di Jawa Timur. Data yang digunakan untuk analisis adalah APBD tahun 2003-2013. Pengujian dilakukan dengan regresi kemudian dianalisis secara deskriptif.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Flypaper Effect*

Istilah *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “*money sticks where it hits*”. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Maimunah, 2006).

Flypaper effect adalah fenomena penyimpangan dalam hubungan transfer keuangan pemerintah pusat dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah lokal, terjadi ketika pemerintah menerima *grant*, maka akan dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya atau belanja tanpa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Flypaper effect merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. Maimunah (2006) menjelaskan bahwa *flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri.

Kemudian menurut Dougan dan Kenyon (dalam Ndadari, 2008) menyebutkan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan penambahan pendapatan yang diperoleh masyarakat. *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Kuncoro (2007) mengungkapkan fenomena *flypaper effect* mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998 dalam Kuncoro, 2007). *Flypaper effect* merupakan kondisi dimana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan meningkatkan belanja publik jika dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Sementara itu, Gorodnichenko (2011) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, dan mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Flypaper effect merupakan suatu kondisi pada saat pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja yang akan dihabiskannya, sehingga belanja periode mendatang cenderung lebih besar jumlahnya. *Flypaper effect* mengacu pada suatu kenyataan bahwa Pemda merespon perubahan belanja secara berbeda tergantung pada apakah perubahan itu disebabkan karena peningkatan DAU atau karena peningkatan pendapatan pajak.

Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah sendiri. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:

1. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (*Fiscal gap*) akan tetap ada.
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat
4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan (Walidi, 2009: 35).

2.2 Bukti Empiris *Flypaper Effect*

Beberapa penelitian di Amerika membuktikan adanya fenomena *flypaper effect*. Studi yang dilakukan Gramlich (1987) menemukan bahwa *flypaper effect* terjadi di Negara bagian dan municipal di AS antara tahun 1980-1996. Deller et al (2007) menguji hubungan belanja dan transfer di 581 desa, kota dan Negara bagian di Wisconsin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah daerah yang menerima transfer menghabiskan dana tersebut lebih dari yang diprediksi oleh teori pemilih nilai tengah. Peneliti menyimpulkan bahwa teori ekonomi murni memiliki keterbatasan dalam hal belanja pemerintah daerah dan oleh karenanya faktor-faktor politik dan institusi dibutuhkan dalam pertimbangan pemberian DAU.

Deller dan Maher (2005) melakukan studi di Wisconsin. Ketika grants tidak diberi syarat municipal membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan yang tidak penting lebih kepada barang-barang mewah seperti taman dan rekreasi, kebudayaan dan pelayanan pendidikan daripada kebutuhan umumnya seperti keamanan dan pemadam kebakaran.

Di Inggris juga menghadapi fenomena yang sama. Norman et al (2002) hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat bukti kuat municipal di Inggris dan Wales melakukan ilusi grant atau sering disebut dengan *flypaper effect*, dengan bukti bahwa terdapat minimnya akuntabilitas atas penerimaan dari pajak property dan ilusi penyewa. Untuk menutupi kekurangan dana membiayai belanja karena minimnya *grant* maka municipal melakukan penyesuaian pada pajak property.

Pada fenomena di Indonesia *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada PAD. Untuk dapat dikatakan terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh harus menunjukkan (1) nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, (2) PAD tidak signifikan (Maimunah, 2006).

Asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* menggunakan perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila pengaruh/ nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan, dan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/ respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2003) melakukan pengujian adanya *flypaper effects* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2002) pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Prakosa (2004) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, tetapi daya

prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Maimunah (2006) melakukan penelitian berkaitan dengan *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap BD dan telah terjadi *flypaper effect* pada BD pada Kabupaten/kota di Sumatera.

Penelitian Widodo (2007) *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di pulau Bali menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* hanya pada perhitungan belanja daerah ditahun 2003, sedangkan tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak ditemukan adanya *Flypaper Effect* pada belanja pemerintah Kabupaten/kota di Bali.

Kuncoro (2007) meneliti tentang fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional.

Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Kusumadewi & Rahman (2007) yang meneliti tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAUt-1 terhadap Belanja Daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja Daerah *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

Pramuka (2010) ternyata menyimpulkan tidak terjadinya *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Dan Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia. Letaknya yang strategis yaitu antara pulau Bali dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah Barat Indonesia. Pada tahun 2002 Propinsi Jawa Timur bertambah satu

Pemerintah Kota yaitu Kota Batu. Jadi, Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur sampai saat ini berjumlah 38.

Artikel ini mengupas tentang hasil pengujian atas 38 laporan keuangan daerah untuk membuktikan adanya fenomena *fly paper effect* di kabupaten kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah antara tahun 2003 sampai dengan 2013. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen Laporan Realisasi & Anggaran APBD pemerintahan kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian menggunakan data panel, data serial (runtun waktu) dan data cross sectional (lintas kabupaten/kota). Untuk data panel, jumlah data yang diolah adalah 418 data kabupaten-tahun. Hasil pengujian untuk data tersebut menunjukkan distribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah.

Tabel Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	3625.54	2570793.94	95104.6681	2.25329E5
DAU	87420.00	1439234.03	487216.9557	2.42106E5
BD	121577.37	5720099.16	813888.7187	6.36542E5

Belanja pemerintah kabupaten atau kota diklasifikasikan berdasarkan ekonomi, organisasi, fungsi. Berdasarkan data tahun 2003-2013 yang diperoleh dari 38 kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur nilai tertinggi belanja daerah sebesar 5.720.099.160.000 dan nilai terendah sebesar 121.577.370.000 sedangkan rata-rata nilainya sebesar 813.888.718.700 serta mempunyai standar deviasi 63.654.200.

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Pada tahun 2003-2013 Dana Alokasi Umum tiap kabupaten dan kota yang ada di propinsi Jawa Timur terus meningkat. Walaupun pada tahun tersebut daerah diberi kekuasaan untuk mengolah daerahnya dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut tidak lepas dengan krisis ekonomi yang menimpa pada bangsa Indonesia. Nilai tertinggi dari DAU adalah 1.439.234.030.000 dan terendah 87.420.000.000 sedangkan rata-ratanya 487.216.955.700 serta mempunyai standar deviasi 24.210.600.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak lepas telah diberlakukannya otonomi daerah. PAD untuk daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur yang tertinggi sebesar 2.570.793.940.000 terendah 3.625.540.000 dan rata-ratanya 95.104.668.100 serta mempunyai standar deviasi 22.532.900.

Pengujian regresi untuk data belanja daerah tahun 2003-2013 untuk kabupaten kota di Jawa Timur menghasilkan koefisien pengaruh belanja daerah oleh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai berikut.

Tabel 2 Pengujian Regresi

	Koefisien takterstandarisasi		Koefisien terstandarisasi	t	Sig.
	Std. Error	Beta			
Konstanta	-45778.475	16917.023		-2.706	.007
PD	1.820	.036	.642	51.255	.000
DAU	1.411	.033	.536	42.813	.000

Dalam persamaan regresi akan nampak sebagai berikut:

$$Y = -45778 + 1,820 \text{ PAD} + 1,411 \text{ DAU}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa apabila tidak ada kenaikan variabel independen lain (variabel independen lain konstan) maka setiap kenaikan 1 juta PAD akan menaikkan belanja daerah sebesar Rp 1,820 juta. Koefisien DAU sebesar 1,411 yang berarti jika variabel independen lain konstan maka setiap kenaikan 1 juta DAU akan menaikkan belanja daerah sebesar Rp 1,087 juta.

Hasil uji t memunjukkan bahwa dari kedua variabel yang dimasukkan dalam model, variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) signifikan mempengaruhi belanja daerah. Nilai koefisien PAD lebih besar terhadap nilai koefisien DAU dan keduanya signifikan. Dengan demikian secara keseluruhan hasil tersebut tidak menunjukkan flypaper effect pada APBD kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2003-2013. Hasil ini berlawanan dengan temuan Maimunah (2006) yang menyimpulkan bahwa pengaruh PAD terhadap BD lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap BD.

Besaran DAU dan Belanja Daerah rata-rata tiap tahun pada kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan periode 2003-2013 mengalami kenaikan. Sedangkan PAD, rata-rata tiap tahun pada kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan periode 2003-2013 berfluktuatif.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada UU Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan adanya pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah yang menjadi sumber keuangan daerah.

Dana perimbangan dimasukkan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Pendapatan sendiri juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

Besarnya belanja daerah sangat berhubungan dengan besarnya DAU yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, dan juga besarnya PAD yang didapat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pada uji t menunjukkan bahwa belanja daerah dipengaruhi oleh PAD dan DAU.

Saat ini tranfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Indonesia yang dalam hal ini disamakan istilahnya dengan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga dalam prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dan utama pemerintahan daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan pada perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di Indonesia.

Nilai koefisien PAD lebih besar dari nilai koefisien DAU. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah di Propinsi Jawa Timur selama tahun 2003-2007. Meskipun DAU merupakan sumber pendapatan utama daerah di Kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, akan tetapi daerah-daerah di Propinsi Jawa Timur juga berupaya untuk meningkatkan PAD yang diperolehnya setiap tahunnya, yang juga dapat digunakan untuk membiayai dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam meningkatkan PAD, Kabupaten dan kota di Jawa Timur menggunakan berbagai cara, misalkan : membuat sarana pariwisata baru, mengadakan even atau acara di daerah masing-masing, atau meningkatkan perolehan pajak daerahnya, dan lain-lain.

Keadaan dimana tidak ditemukan adanya flypaper effect pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur selama tahun 2003-2013 merupakan keadaan yang menggembirakan. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur sudah tidak terlalu bergantung lagi terhadap pemerintah pusat. Atau dengan kata lain kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur sudah lebih bisa mandiri dalam melaksanakan pemerintahannya secara finansial. Dan memang kemandirian daerah inilah yang dicita-citakan dari adanya otonomi daerah.

Tabel 3. Pengujian Regresi dengan Lag

	Koefisien		Koefisien	t	Sig.
	takterstandarisasi	Beta			
(Constant)	-28523.706	25714.391		-1.109	.268
PAD	2.165	.060	.646	36.367	.000
DAU	1.550	.054	.511	28.772	.000

Untuk model lag time satu tahun, jadi PAD dan DAU tahun t-1 mempengaruhi BD tahun t juga menunjukkan hasil yang sama. Baik PAD maupun DAU

memiliki pengaruh positif dengan pengaruh PAD yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fly paper effect selama tahun 2003-2012.

Pengujian Lintas Kabupaten Kota

Pengujian Lintas Kabupaten/kota dilakukan dengan melakukan regresi untuk keseluruhan kabupaten untuk tahun yang sama dalam kurun waktu antara tahun 2003-2013. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Pengujian Tahunan

Tahun	Koefisien PAD	Koefisien DAU	Kategori
2003	1.828**	1.124**	TM FPE
2003	1.828**	1.124**	TM FPE
2004	1.858**	1.070**	TM FPE
2005	1.790**	0.832**	TM FPE
2006	1.757**	0.999**	TM FPE
2007	1.296**	1.249**	TM FPE
2008	1.966**	1.026**	TM FPE
2009	3.507**	1.095**	TM FPE
2010	3.507**	1.095**	TM FPE
2011	1.949**	1.485**	TM FPE
2012	1.519**	1.506**	TM FPE
2013	1.569**	1.437**	TM FPE

** signifikan pada 0,05

TM FPE tidak menunjukkan *flypaper effect*

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa untuk tiap tahun, keseluruhan kabupaten kota di Jawa Timur tidak terbukti melakukan *flypaper effect*. Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, koefisien PAD dalam mempengaruhi pendapatan daerah melebihi koefisien belanja daerah. Hanya untuk periode tahun 2007, 2012, dan 2013 yang besaran koefisiennya hampir sama besar. Namun hal tersebut belum mencukupi untuk mengidentifikasi sebagai tindakan *flypaper effect*.

Pengujian Serial Waktu

Hasil pengujian serial waktu dilakukan dengan melakukan regresi untuk masing-masing kabupaten dalam kurun waktu antara tahun 2003-2013. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian Serial Waktu

No	Nama	Koefisien PAD	Koefisien DAU	Kategori
1	Kab. Bangkalan	-0.569	2.078**	FPE
2	Kab. Banyuwangi	-1.067	2.021**	FPE
3	Kab. Blitar	1.979	1.569**	FPE
4	Kab. Bojonegoro	0.566	2.700**	FPE
5	Kab. Bondowoso	-0.172	1.661**	FPE
6	Kab. Gresik	0.915	1.860*	FPE
7	Kab. Jember	2.842**	1.217**	TM FPE
8	Kab. Jombang	-0.14	1.785**	FPE

FLYPAPER EFFECT: FENOMENA SERIAL WAKTU DAN LINTAS KABUPATEN KOTA DI JAWA TIMUR 2003-2013

9	Kab. Kediri	-0.533	1.864**	FPE
10	Kab. Lamongan	0.595	1.726**	FPE
11	Kab. Lumajang	1.953	1.279	FPE
12	Kab. Madiun	1.082	1.578**	FPE
13	Kab. Magetan	2.789	1.258	FPE
14	Kab. Malang	1.645	1.631**	FPE
15	Kab. Mojokerto	0.809	1.527**	FPE
16	Kab. Nganjuk	2.047	1.580**	FPE
17	Kab. Ngawi	-0.45	1.709**	FPE
18	Kab. Pacitan	2.076	1.383**	FPE
19	Kab. Pamekasan	-1.318	2.240**	FPE
20	Kab. Pasuruan	-0.283	2.333**	FPE
21	Kab. Ponorogo	-0.172	1.747**	FPE
22	Kab. Probolinggo	-0.393	1.827**	FPE
23	Kab. Sampang	1.084	1.828**	FPE
24	Kab. Sidoarjo	0.124	2.499**	FPE
25	Kab. Situbondo	1.182	1.659**	FPE
26	Kab. Sumenep	-0.799	1.845**	FPE
27	Kab. Trenggalek	3.589	1.200**	FPE
28	Kab. Tuban	-0.073	2.000**	FPE
29	Kab. Tulungagung	6.648**	0.463**	TM FPE
30	Kota Blitar	1.831	1.388**	FPE
31	Kota Kediri	3.615	0.882**	FPE
32	Kota Madiun	2.254	1.248**	FPE
33	Kota Malang	2.254**	1.248**	TM FPE
34	Kota Mojokerto	1.49	1.382**	FPE
35	Kota Pasuruan	1.811	1.424**	FPE
36	Kota Probolinggo	0.686	1.275	FPE
37	Kota Surabaya	1.465**	1.99	TM FPE
38	Kota Batu	0.431	1.454**	FPE

Sumber: data sekunder diolah

** signifikan pada 0,05

TM FPE, tidak menunjukkan *flypaper effect*

FPE, menunjukkan *flypaper effect*

Hasil pengujian memperlihatkan fenomena yang menarik. Hampir keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur, bila diidentifikasi dari belanja daerah masing-masing tahun 2003 sampai 2013 menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect*. Kabupaten/kota yang tidak teridentifikasi fenomena *flypaper effect* hanya Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Pengujian regresi menunjukkan bahwa 34 kabupaten kota di Jawa Timur, DAU memiliki pengaruh besar terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, bahwa belanja daerah ditentukan oleh besaran DAU yang diterima.

Keseluruhan hubungan antara belanja daerah dan DAU tersebut adalah positif. Peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah. Hasil ini menguatkan bahwa sebenarnya, kabupaten kota di Jawa Timur masih menggantungkan belanja daerahnya mana DAU.

Kabupaten / kota di Jawa Timur mengalami *flypaper effect*. Respon BD lebih besar terhadap DAU apabila dibandingkan dengan respon BD terhadap PAD. DAU digunakan oleh kabupaten / kota secara prioritas untuk membiayai anggaran belanja pegawai. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan Sukriy (2003), Prakoso (2004), Pratiwi (2007) dan Widodo (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian Maimunah (2006) maupun Kusumadewi dan Arief (2007). Hasil ini memperkuat teori bahwa penyusunan anggaran bersifat *incrementalism*, alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan bertambah / berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.

Hasil telah membuktikan besarnya belanja daerah pada kabupaten / kota di Jawa Timur masih lebih besar dipengaruhi oleh dana perimbangan khususnya DAU yang diterima dari pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah masih tinggi.

Koefisien DAU umumnya lebih besar dan signifikan daripada koefisien PAD. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanjadaerah. Hal ini sejalan dengan data di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah belum memiliki dukungan PAD dan kurang dalam berinisiasi mengembangkan sumber pendapatan asli daerah sehingga sangat bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Umumnya pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Seharusnya pemerintah daerah mulai untuk mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahnya dengan cara-cara yang cerdas sehingga berdampak pada meningkatnya PAD. Bagaimana pun, pemerintah daerah harus segera mandiri dan tidak selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

4. SIMPULAN

Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD). Hasil pengujian untuk runtun waktu menunjukkan bahwa dengan data tahun 2003-2013 terjadi *flypaper effect* yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Kabupaten / kota di Jawa Timur umumnya mengalami *flypaper effect* terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari komponen DAU. Semakin besar dana transfer (DAU) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat yang disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat menyejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy., dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 1140-1159.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol 2 No.1*.
- Deller, C. Steven and Craig, S. Maher. 2005. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. *Public Budgeting & Finance*, Vol. 5, No.3, page 73-90.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Winconsin local government, state shared revenues and the illusive flypapereffect. University of Winconsin-Madison, *Working Paper*.
- Doessel, D.P. dan A. Valadkhani. 2002. Public Finance and the Size of Government: A Literature Review and Econometric Results for Fiji. *Discussion Papers No. 108*, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Maret, http://www.qut.edu.au/schools/economics/research/disc_pre2001.jsp
- Gorodnichenko, Y. 2001. *Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine*, Master Thesis, University of Kiev, <http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2001/pdf/gorodnichenko.pdf>.
- Gramlich, E.M. 1977. Intergovernmental Grants: A Review of the Empirical Literature, dalam W.E. Oates, (Ed.), *The Politic Economy of Fiscal Federalism*, Lexington Books, Lexington MA: 219-40.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI, Juni 2007, Vol. 11, No.1, pp. 67-80*.

- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY, JAAI. vol. 8, no. 2, hal. 101-118.
- Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008.
- Norman, Gemmel et al. 2002. Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence form Two Local Tax Regimes in Britain. *Public Choice*, Vol. 110, page 199-224.
- Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* Vol.XXXVII (September 1999) pp. 1120–1149
- Prakosa, Kesit.M. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*..
- Pramuka, Bambang Agus. 2010. *Flypaper Effect* Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Pratiwi, Maulida Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten / Kota di Indonesia, *Skripsi*, UII, Yogyakarta.
- Purwoko. 1999. Kajian Tentang Peranan DAU Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Daerah Otonom . Viewed 27 July 2012
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Tesis*. Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009.
- Widodo, Pambudi Tri. 2007. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Bali, Skripsi*, UII, Yogyakarta